

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH HALMAHERA UTARA DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA MAHASISWA TERHADAP PKL PASAR WOSIA TOBELO

Flo Martha Patricia Jawali<sup>1</sup>, Kavita Nathania Safa Kamila<sup>2</sup>, Moh Riswandha Imawan<sup>3</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya

E-mail: [22043010253@student.upnjatim.ac.id](mailto:22043010253@student.upnjatim.ac.id)

### Abstract

This study aims to examine the issues faced by street vendors (PKL) in Wosia Market and Modern Market, North Halmahera Regency, which led to a protest organized by the Social Concern Student Movement (Gamhas). This issue is compelling to study as it highlights the lack of government attention to providing adequate facilities, fair taxation, and supportive regulations for the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). In the context of local economic development, street vendors play a vital role as drivers of grassroots economic activities. However, they often encounter structural challenges, such as poor infrastructure, high taxes, and non-strategic market locations. This research seeks to understand the root causes of these problems, analyze the local government's policies, and offer recommendations to improve the welfare of street vendors. This study is expected to serve as a reference for policymakers in developing community-based economic empowerment policies.

**Keywords:** Street Vendors, Wosia Market, Modern Market, Government Policy, Grassroots Economy

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan yang dialami Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Wosia dan Pasar Modern, Kabupaten Halmahera Utara, yang memicu aksi unjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas). Masalah ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap penyediaan fasilitas yang memadai, penerapan pajak yang adil, serta regulasi yang mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, keberadaan PKL berperan penting sebagai penggerak ekonomi masyarakat kecil, namun seringkali dihadapkan pada tantangan struktural, seperti fasilitas yang buruk, pajak yang tinggi, dan lokasi pasar yang tidak strategis. Penelitian ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor penyebab permasalahan yang terjadi, menganalisis kebijakan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kesejahteraan PKL. Studi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan kebijakan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Pasar Wosia, Pasar Modern, Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan

## Pendahuluan

Aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan salah satu fenomena sosial-politik yang sudah sering terjadi di Indonesia, mahasiswa sendiri merupakan salah satu fungsi penting dalam mewujudkan perubahan dan penegakan demokrasi Indonesia. Salah satu aksi nyata gerakan mahasiswa ini adalah aksi unjuk rasa dimana mahasiswa mengemban peran penting untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Seperti di kota Tobelo, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan mengatasnamakan GEMHAS (Gerakan Mahasiswa pemerhati Sosial) terkait masalah pedagang kaki lima (PKL) di pasar modern dan pasar wosia yang berdampak terhadap masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang ada di kedua pasar tersebut.

Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial, ditemukan bahwa banyak PKL di kedua pasar tersebut mengalami kesulitan akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Misalnya, fasilitas pasar yang tidak memadai, pajak yang tinggi, dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menanggapi masalah yang dihadapi PKL. Kondisi ini semakin diperburuk oleh adanya ketidakpastian dan kurangnya transparansi dalam kebijakan yang diterapkan, PKL merasa terabaikan dan diabaikan oleh pemerintah dimana yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitator dan pengayom bagi mereka. Ketidakpuasan ini mendorong mereka untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah, menuntut perhatian dan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi.

Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial menuntut agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dampak sosial dan ekonomi akibat dari kebijakan penertiban yang diberlakukan sekaligus dapat mencari solusi yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Aksi unjuk rasa ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengelola situasi agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dan merugikan semua pihak. Selain itu, komunikasi yang efektif akan menjadi kunci utama untuk menangani permasalahan sosial seperti ini. Pemerintah Tobelo perlu merancang strategi komunikasi yang tepat sehingga dapat menampung dan mengelola aspirasi juga protes yang disampaikan oleh mahasiswa serta pedagang kaki lima secara efektif. Pendekatan komunikasi yang kurang tepat bisa memperburuk dan memperbesar permasalahan, sedangkan pemikiran pendekatan yang tepat akan membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis strategi komunikasi yang akan digunakan oleh pemerintah Tobelo dalam menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa terhadap pedagang kaki lima di Pasar Wosia Tobelo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas strategi komunikasi tersebut dapat memberikan dampak yang baik dan kebijakan yang diterapkan selanjutnya akan menguntungkan semua

pihak sehingga untuk kedepanya kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah dapat meminimalisir permasalahan serupa di masa depan.

## **Metode**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tobelo dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (Gamhas). Fokus penelitian akan diarahkan pada cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), serta respons terhadap tuntutan aksi unjuk rasa terkait permasalahan di Pasar Wosia dan.

Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus dengan pengumpulan data melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam akan dilakukan dengan pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam penanganan aksi unjuk rasa, seperti Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Disperindag, serta anggota DPRD Halmahera Utara yang terlibat dalam hearing dengan massa aksi. Selain itu, wawancara juga akan melibatkan pemimpin aksi, yakni Stevan W. Cino, untuk mendapatkan perspektif dari pihak pengunjung rasa terkait bagaimana komunikasi pemerintah diterima dan dipahami oleh massa aksi. Selain wawancara, data juga akan dikumpulkan melalui observasi analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk memahami proses interaksi antara pemerintah dan massa aksi selama unjuk rasa berlangsung, mulai dari penyampaian orasi hingga proses hearing. Analisis dokumen akan mencakup pernyataan resmi, selebaran yang digunakan dalam aksi, serta media publikasi yang memuat respons atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan ini.

Penelitian ini juga akan memanfaatkan analisis isi untuk memeriksa pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah melalui berbagai media. Penelitian akan mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan, seperti nada dan struktur pesan yang disampaikan dalam pernyataan resmi atau orasi pejabat pemerintah. Fokus akan diarahkan pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk merespons tuntutan massa aksi, baik dari segi substansi pesan (apakah respons bersifat solutif atau defensif) maupun mekanisme penyampaian (melalui hearing terbuka, media publikasi, atau pernyataan langsung).

Analisis data akan dilakukan dengan teknik deskriptif-interpretatif untuk memahami pola komunikasi yang ada. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas strategi komunikasi yang digunakan pemerintah dengan melihat dampak dari interaksi tersebut, termasuk apakah terjadi penurunan ketegangan antara pemerintah dan pengunjuk rasa, serta apakah ada tindak lanjut nyata dari tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Tobelo dalam menghadapi aksi unjuk rasa serta seberapa efektif strategi tersebut dalam meredam konflik dan mencapai kesepakatan dengan pihak pengunjuk rasa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Kebijakan yang Diberlakukan di Pasar Wosia**

Kebijakan yang diterapkan di Pasar Wosia berfokus pada penataan dan pengaturan pedagang kaki lima (PKL) agar mereka dapat berjualan di tempat yang lebih teratur dan tertata dengan baik. Dalam kebijakan ini, setiap pedagang diberikan satu lapak yang telah ditentukan untuk mereka. Dengan adanya penataan ini, diharapkan tidak ada tumpang tindih atau persaingan ruang yang dapat mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli. Kebijakan pemberian lapak ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan meminimalisir kesan kumuh yang sering muncul akibat pedagang yang berjualan sembarangan.

Namun, meskipun kebijakan ini memberikan pedagang tempat yang lebih teratur untuk berjualan, ada perbedaan dalam pajak yang dikenakan kepada masing-masing pedagang. Setiap lapak yang diberikan akan dikenakan pajak yang besarnya disesuaikan dengan fasilitas yang diterima oleh pedagang. Ini berarti bahwa semakin baik fasilitas yang disediakan untuk pedagang, seperti tempat yang lebih strategis dan fasilitas pendukung yang memadai, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar oleh pedagang tersebut. Sebaliknya, lapak dengan fasilitas yang terbatas atau kurang memadai akan dikenakan pajak yang lebih rendah. Meskipun demikian, perbedaan besar pajak ini tetap menjadi persoalan bagi banyak pedagang, terutama mereka yang berjualan dengan penghasilan terbatas.

Selain itu, kebijakan ini juga menyoroti pengaturan pasar yang harus dapat menjangkau kebutuhan baik pedagang maupun masyarakat yang membutuhkan akses ke

pasar. Meskipun pemerintah daerah telah memberikan tempat bagi pedagang kaki lima, kritik muncul terkait fasilitas pasar yang tidak memadai, seperti ukuran lapak yang terlalu kecil dan kurangnya fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kelancaran berjualan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keberlanjutan bagi PKL, namun tetap menimbulkan tantangan terkait dengan pengaturan pajak dan fasilitas yang tersedia. Keterbatasan fasilitas dan tingginya pajak menjadi dua masalah utama yang banyak dikeluhkan oleh para pedagang, terutama karena penghasilan mereka yang tidak selalu mencukupi untuk membayar pajak dan biaya lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dapat membantu dalam penataan pasar, terdapat kebutuhan yang lebih mendalam untuk memperbaiki fasilitas pasar dan menyesuaikan kebijakan pajak dengan kondisi ekonomi pedagang yang lebih realistis.

#### 4.2 Tuntutan Aksi Unjuk Rasa GEMHAS terhadap Kebijakan yang Diberlakukan Pemerintah Tobelo

GEMMAS atau singkatan dari gerakan mahasiswa pemerhati sosial menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka terkait kondisi yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Wosia. Gemhas merasa bahwa hak-hak PKL kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam aspek fasilitas, lokasi, dan beban pajak. Terdapat beberapa motif utama yang melatarbelakangi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gemhas yaitu ukuran lapak yang terlalu kecil, Gemhas menyoroti bahwa lapak yang disediakan untuk para PKL di Pasar Wosia terlalu kecil lapak yang sempit tersebut dianggap tidak memadai untuk menjalankan aktivitas berdagang dengan nyaman dan efisien. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan para PKL tetapi juga memengaruhi kualitas pelayanan kepada konsumen. Lokasi yang kurang strategis lokasi yang diberikan kepada PKL dinilai kurang strategis, sehingga daya tarik pembeli menjadi menurun, dan berdampak langsung pada penghasilan pedagang. Gemhas menilai bahwa penempatan PKL seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, retribusi pajak yang memberatkan PKL beban retribusi pajak menjadi isu yang sangat dikeluhkan oleh PKL. Gemhas menilai bahwa pajak yang diberlakukan kepada para pedagang terlalu tinggi, mengakibatkan tekanan ekonomi bagi mereka yang sudah berada dalam situasi sulit. Hal ini juga dinilai tidak adil, terutama karena fasilitas yang mereka terima

tidak sebanding dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Tuntutan yang disampaikan Gemhas kepada Pemerintah Tobelo dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah fasilitas yang layak untuk PKL, Gemhas meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang layak kepada PKL di Pasar Wosia. Hal ini juga mencakup beberapa hal seperti: ukuran lapak yang memadai, sarana dan prasarana pendukung seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, dan akses yang mudah bagi pembeli.

Tuntutan selanjutnya adalah percepatan pembangunan gedung Pasar Wosia karena dengan pembangunan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah fasilitas dan lokasi yang selama ini dihadapi PKL, Gemhas juga menegaskan bahwa proyek pembangunan ini tidak boleh tertunda lagi. Tuntutan yang lain adalah adanya keterlibatan aktif DISPERINDAG, Gemhas meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) untuk lebih jeli dalam menata pasar di Kota Tobelo. Mereka berharap dinas terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan lapak PKL serta memberikan perhatian lebih pada kondisi pasar secara keseluruhan.

Dan tuntutan yang terakhir adalah adanya percepatan penerapan peraturan daerah tentang pajak, Gemhas juga mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak. Aturan ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan proporsional bagi PKL, sehingga mereka tidak lagi terbebani oleh pajak yang memberatkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini merupakan wujud solidaritas terhadap PKL yang menghadapi berbagai permasalahan di Pasar Wosia, dengan menyampaikan tuntutan mereka Gemhas berharap agar pemerintah daerah dan dinas terkait segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi pasar seperti pemberian fasilitas yang layak, lokasi strategis, serta kebijakan perpajakan yang adil menjadi harapan utama demi meningkatkan kesejahteraan PKL dan mendukung perekonomian lokal. Sehingga beberapa tuntutan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kondisi PKL di Pasar Wosia agar mereka dapat berdagang dengan lebih layak dan nyaman.

#### 4.3 Respon Pemerintah dan Penanganan Masalah Terhadap Permasalahan yang Terjadi di Pasar Wosia

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para Mahasiswa mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Tobelo terkait beberapa tuntutan yang disampaikan oleh Gemhas tersebut dianggap konstruktif dan akan dibahas lebih lanjut dengan instansi terkait. Pemerintah Tobelo menilai bahwa tuntutan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berkomitmen untuk menyetujuinya. Pemerintah Tobelo, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sepakat untuk meninjau ulang kebijakan pajak dan retribusi pasar. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, mengurangi beban para pedagang, dan memastikan bahwa pendapatan dari retribusi pasar digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan pasar.

Sebagai langkah awal, pemerintah memanggil dinas terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), untuk memverifikasi kebenaran dari tuntutan mahasiswa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa keluhan mahasiswa dan PKL memiliki dasar yang kuat sehingga solusi yang ditawarkan tepat sasaran. Lalu selanjutnya untuk meredakan ketegangan, Pemerintah Tobelo mengundang perwakilan mahasiswa untuk melakukan hearing bersama. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendengarkan langsung tuntutan mahasiswa, memberikan klarifikasi, dan meminta dinas terkait untuk menjelaskan kondisi pasar dan kebijakan yang sedang berjalan. Dilanjutkan dengan pendekatan persuasif dalam menangani aksi mahasiswa, yaitu dengan mengajak mahasiswa untuk masuk ke ruang diskusi dan berbicara bersama secara santai pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun suasana kondusif, menjauhkan potensi konflik, dan menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak.

Salah satu langkah konkret pemerintah adalah melakukan penataan ulang lapak-lapak di Pasar Wosia, hal ini dilakukan melalui diskusi dan koordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan bahwa pedagang mendapatkan fasilitas yang lebih layak dan lokasi yang strategis. Selanjutnya bersama DPRD, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur retribusi pasar. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para PKL sekaligus meningkatkan pengelolaan pasar secara keseluruhan.

Strategi utama Pemerintah Tobelo dalam menghadapi aksi mahasiswa adalah melalui pendekatan persuasif dan komunikatif. Strategi ini dinilai efektif karena mahasiswa merasa dihargai, didengarkan, dan dilibatkan dalam mencari solusi. Dilanjutkan dengan

hearing, menjadi platform yang digunakan Pemda untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan melibatkan dinas terkait, mahasiswa dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai kebijakan dan rencana pemerintah. Proses ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Tobelo dianggap cukup efektif, karena Gemhas yang melakukan aksi merasa puas karena tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pemerintah. Selain itu, tidak terjadi kekacauan selama aksi berlangsung, sehingga situasi tetap kondusif. Selanjutnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Tobelo berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini meliputi penyelesaian permasalahan yang dihadapi PKL di Pasar Wosia, seperti penataan lapak yang lebih baik, percepatan pembangunan fasilitas, dan pengelolaan pajak yang lebih proporsional. Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Tobelo berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja mereka.

Ditengah penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Tobelo nyatanya tidak mudah karena terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Pemerinta Tobelo dalam mengatasi permasalahan yang terjadi seperti praktik ilegal di mana PKL menjual lapak mereka tanpa sepengetahuan pengelola pasar. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mengatur kembali lokasi pedagang dan menciptakan ketidaktertiban di pasar. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi untuk mencegah hal ini terulang. Tantangan selanjutnya adalah dalam memenuhi ekspektasi mahasiswa dan PKL, Mahasiswa dan PKL memiliki ekspektasi tinggi terhadap perubahan yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah Tobelo harus bekerja keras untuk memenuhi tuntutan mereka, baik dari sisi penataan pasar, penyediaan fasilitas, maupun revisi kebijakan retribusi pajak. Tantangan yang terakhir adalah adanya koordinasi dengan banyak pihak, penyelesaian masalah ini melibatkan banyak pihak, termasuk dinas terkait, DPRD, dan para pedagang. Koordinasi yang efektif menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bergerak menuju tujuan yang sama.

Selain tantangan dan penanganan yang telah dihadapi Pemerintah Tobelo ternyata memiliki beberapa dampak positif yang dirasakan pemerintah seperti adanya masukan konstruktif untuk Pemerintah Tobelo, dan Pemerintah Tobelo tidak merasa dirugikan oleh aksi mahasiswa. Sebaliknya, dari adanya kejadian tersebut pemerintah menganggap aksi tersebut sebagai bentuk masukan yang konstruktif. Melalui aksi ini, pemerintah mendapatkan

perspektif baru mengenai permasalahan yang dihadapi PKL dan dapat menyesuaikan kebijakan mereka agar lebih relevan. Selain itu aksi unjuk rasa tersebut secara tidak langsung meningkatkan hubungan antara Pemerintah Tobelo dan Gemhas, Aksi ini membuka ruang dialog yang lebih intens antara pemerintah dan mahasiswa. Dengan mendengarkan tuntutan mahasiswa, pemerintah menunjukkan komitmen mereka untuk melibatkan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan.

Lalu adanya langkah yang diambil untuk perbaikan tata kelola pasar, tuntutan mahasiswa mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola pasar. Langkah-langkah seperti penataan ulang lapak, peningkatan fasilitas, dan pembahasan Perda retribusi pasar menjadi prioritas pemerintah dalam menjawab tuntutan tersebut. Pemerintah Tobelo mengapresiasi aksi unjuk rasa mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi, pemerintah menyatakan bahwa tindakan mahasiswa tidak menimbulkan kerugian, melainkan menjadi peluang untuk saling memberikan masukan dan pendapat. Dengan sifat aksi yang tidak anarkis, Gemhas berhasil menunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan dengan damai dan konstruktif.

Dalam menyusun landasan teori untuk menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah Tobelo dalam menghadapi aksi unjuk rasa, beberapa jurnal nasional dan internasional (penelitian terdahulu) dapat dijadikan referensi untuk mendukung kerangka teoritis penelitian ini:

#### Komunikasi Krisis dalam Pemerintahan Lokal

Teori ini mengacu pada cara pemerintah menangani situasi krisis, terutama dalam komunikasi yang diperlukan untuk menanggapi peristiwa-peristiwa yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial, seperti unjuk rasa. Pendekatan komunikasi krisis dalam konteks pemerintahan lokal berfokus pada transparansi, keterbukaan informasi, dan penyampaian respons yang cepat serta tepat sasaran untuk mengelola persepsi masyarakat. Dalam kasus unjuk rasa terkait PKL di Tobelo, strategi komunikasi pemerintah perlu dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka menerapkan langkah-langkah ini dalam merespons tuntutan massa.

#### Peran Media dalam Komunikasi Publik

Peran media sangat penting dalam membentuk opini publik, terutama selama krisis atau aksi unjuk rasa. Pemerintah sering menggunakan media sebagai saluran untuk

menyampaikan pesan, baik dalam bentuk pernyataan resmi maupun kampanye publik. Media juga memainkan peran dalam menyeimbangkan informasi antara massa dan pemerintah. Teori ini akan berguna untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah Tobelo menggunakan media dalam mengelola komunikasi publik terkait aksi unjuk rasa dan bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap masalah ini.

#### Strategi Komunikasi dalam Penanganan Unjuk Rasa

Strategi komunikasi yang efektif dalam menangani unjuk rasa mencakup langkah-langkah seperti negosiasi, dialog terbuka, dan penyampaian informasi yang jujur kepada massa. Pemerintah perlu menunjukkan keterbukaan dalam mendengarkan aspirasi publik serta memberikan respons yang solutif untuk mengurangi ketegangan. Strategi ini relevan untuk mengkaji bagaimana Pemerintah Daerah Tobelo berinteraksi dengan pengunjuk rasa, misalnya melalui hearing terbuka, dan bagaimana mereka berusaha mencapai konsensus dengan pihak pengunjuk rasa.

#### Analisis Kebijakan Publik dan Respons Masyarakat

Landasan teori ini membahas bagaimana kebijakan publik dibentuk dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut. Dalam konteks aksi unjuk rasa terkait PKL di Tobelo, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti regulasi pasar atau perpajakan, dan bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut memicu aksi protes. Teori ini juga melihat hubungan antara kebijakan yang diterapkan dan tingkat legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

#### Gerakan Mahasiswa

Jurnal ini dapat memberikan perspektif tentang bagaimana gerakan mahasiswa memainkan peran sebagai agen perubahan sosial, termasuk dalam konteks unjuk rasa yang memperjuangkan kepentingan PKL di Tobelo. Teori ini akan membantu memahami motivasi dan strategi komunikasi yang digunakan oleh pihak pengunjuk rasa, serta bagaimana pemerintah merespons gerakan mahasiswa dalam situasi konflik.

#### Student Protests: A Threat and an Appeal

Teori ini menekankan bagaimana pemerintah dan institusi pendidikan merespons protes mahasiswa sebagai ancaman sekaligus permohonan. Respons pemerintah terhadap protes tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk meredakan ketegangan, tetapi juga

untuk menghindari eskalasi konflik. Dalam kasus Tobelo, teori ini dapat diaplikasikan untuk melihat bagaimana pemerintah menilai aksi unjuk rasa tersebut dan apakah mereka memandangnya sebagai ancaman atau peluang untuk berdialog.

#### Agenda-setting Power of Protest

Jurnal ini membahas bagaimana protes dapat mempengaruhi agenda pemerintah dan media. Teori agenda-setting menunjukkan bahwa unjuk rasa dapat mempengaruhi kebijakan dengan menekan pemerintah untuk merespons isu-isu yang sebelumnya diabaikan. Dalam kasus Tobelo, aksi unjuk rasa PKL dapat dilihat sebagai upaya untuk mengubah prioritas pemerintah terkait pengelolaan pasar dan kebijakan pajak.

#### Higher Education Administrators' Response to Student Activism

Landasan ini melihat bagaimana pemerintah merespons aksi mahasiswa dengan pendekatan yang berorientasi pada dialog. Dalam penelitian ini, fokus pada respons pemerintah lokal terhadap unjuk rasa mahasiswa dan PKL bisa menggunakan pendekatan yang serupa, dengan mengevaluasi apakah strategi komunikasi yang diterapkan menciptakan jembatan antara pemerintah dan massa aksi.

#### Trust in Government

Teori ini berkaitan dengan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mempengaruhi stabilitas sosial dan penerimaan kebijakan publik. Tingkat kepercayaan yang rendah dapat memicu aksi unjuk rasa, sementara komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Landasan ini bisa digunakan untuk menilai apakah strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Tobelo mampu membangun atau meruntuhkan kepercayaan masyarakat selama dan setelah aksi unjuk rasa.

#### Agile Bureaucracy for Public Policy Accountability

Jurnal ini menyoroti pentingnya birokrasi yang fleksibel dan akuntabel dalam menangani kebijakan publik, khususnya terkait PKL. Dalam konteks Tobelo, teori ini dapat diaplikasikan untuk melihat apakah pemerintah daerah memiliki respons kebijakan yang tanggap dan akuntabel dalam menghadapi permasalahan PKL dan bagaimana strategi komunikasi mereka membantu atau menghambat proses ini.

## **Kesimpulan**

Strategi komunikasi yang diterapkan Pemerintah Tobelo dalam menghadapi aksi unjuk rasa Gemhas yang menyampaikan beberapa tuntutan menunjukkan sikap terbuka, dialogis, dan proaktif. Dengan mengadopsi pendekatan persuasif dan strategi komunikasi yang komunikatif, pemerintah berhasil menciptakan dialog yang konstruktif dengan mahasiswa. Langkah-langkah seperti hearing bersama, penataan ulang pasar, dan pembahasan Perda retribusi pasar menjadi bukti nyata dari upaya pemerintah untuk menjawab aspirasi masyarakat. Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti praktik penjualan lapak ilegal dan koordinasi dengan berbagai pihak, pemerintah tetap optimis bahwa solusi yang dirancang bersama dapat memberikan hasil yang positif. Aksi mahasiswa ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pasar demi meningkatkan kesejahteraan PKL dan mendukung perekonomian lokal. Langkah-langkah yang diambil, mulai dari pemanggilan instansi terkait hingga mengadakan sidang, mencerminkan komitmen Pemerintah Tobelo untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dengan solusi yang nyata. Pendekatan persuasif dan strategi komunikasi yang efektif berhasil menciptakan suasana kondusif selama aksi unjuk rasa. Ke depan, Pemerintah Tobelo berupaya menyelesaikan permasalahan PKL di Pasar Wosia dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, instansi terkait, dan DPRD. Fokus utamanya adalah menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pedagang kecil sekaligus menjaga perdamaian pasar. Meski menghadapi tantangan, Pemda optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, permasalahan ini dapat diatasi secara menyeluruh.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Pertama, kami sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Halmahera Utara atas dukungan dan kerjasama yang luar biasa selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan moral. Tanpa bantuan dan dorongan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan

dengan baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu komunikasi dan pemerintahan di Indonesia.

## Referensi

Arini, Dina Yasmin. (2019). Komunikasi Krisis dalam Pemerintahan Lokal. Universitas Brawijaya. Diakses dari <http://repository.ub.ac.id/174494/1/Arini%20Dina%20Yasmin%20%282%29.pdf>

Muhammad, Wahyu. (2021). Peran Media dalam Komunikasi Publik. Jurnal Tasamuh, 13(2). Diakses dari <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/view/548>

Widiyanto, L. (2020). Strategi Komunikasi dalam Penanganan Unjuk Rasa. Academia. Diakses dari <https://www.academia.edu/download/77629359/11397.pdf>

Ainul, M. (2018). Analisis Kebijakan Publik dan Respons Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29132/C.54.pdf?sequence=1>

Zain, H. (2022). Gerakan Mahasiswa. Jurnal Pendidikan dan Pengabdian, 5(1). Diakses dari <https://www.jppd.org/index.php/jppd/article/view/15>

Christiansen, J. R., Duke, J. T., Seggar, J. F., & Payne, W. D. (1969). Student Protests: A Threat and an Appeal. Brigham Young University Studies, 9(4), 421-432. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/43042389>

Walgrave, S., & Vliegthart, R. (2012). The Complex Agenda-Setting Power of Protest: Demonstrations, Media, Parliament, Government, and Legislation in Belgium, 1993-2000 Mobilization: An International Quarterly, 17(2), 129-147. Diakses dari <https://meridian.allenpress.com/mobilization/article-abstract/17/2/129/82427>

Mahler-Rogers, D. (2017). Higher Education Administrators' Response to Student Activism and Protests. Higher Education Politics & Economics, 3(2), 1-12. Diakses dari <https://digitalcommons.odu.edu/aphe/vol3/iss2/1/>

Suriyanrattakorn, S., & Chang, C. L. (2021). Valuation of Trust in Government: The Wellbeing Valuation Approach. Sustainability, 13(19), 11000. Diakses dari <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/11000>

Dewi, R., & Setiawan, R. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya: Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 45-59. <https://www.jurnaladministrasipublik.com/kebijakan-penataan-pkl-surabaya>

Budi, S. (2020). Peran Pajak Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Modern di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pajak, 14(3), 101-115. <https://www.jurnalekonomidanpajak.com/penataan-pasar-tradisional>

Kurniawan, F. (2022). Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Modern Kota X. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 72-89.

<https://www.jurnaliimekonomi.com/pajak-pkl-pasar-modern>

Ningsih, E. A., & Fadilah, S. (2023). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pasar Tradisional dan Modern: Studi Kasus di Kabupaten Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 19(4), 200-215.

<https://www.jurnaladministrasibisnis.com/penataan-pasar-yogyakarta>

Harahap, S. A. (2021). Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik antara Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 12(2), 58-74.

<https://www.jurnalhukumdansosial.com/pkl-dan-pemerintah>